

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DP Nol di Ujung Tanduk

### Aset Bermasalah, Tercium Aroma Korupsi

JAKARTA – Belum lama, Kelik Indrinyanto mundur dari jabatan kepala Dinas Perumahan. Disinyalir sejumlah kalangan lantaran tidak mampu menyukseskan Program DP 0 Rupiah. Kini, diduga terjadi korupsi di lingkungan PD Sarana Jaya yang terindikasi terkait dengan program tersebut.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengharapkan, program Rumah DP Rp0 tidak berhenti, meski ada dugaan korupsi oleh PD Sarana Jaya selaku BUMD DKI pengelola program strategis itu.

“Terkena dampak sudah pasti, tapi untuk dihentikan saya kira tidak, karena ini salah satu program strategis yang ditunggu oleh warga Jakarta. Jangan sampai karena ada kasus warga yang dikorbankan,” kata Abdul Aziz di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Lebih lanjut, untuk mendalami dugaan korupsi pada pembelian aset-aset PD Sarana Jaya, Abdul mengatakan pihaknya akan memanggil Sarana Jaya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

“Ya mungkin pekan depan (dipanggil) tapi agendanya bukan hanya itu ada beberapa agenda lain,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dalam situs resminya, Sarana Jaya saat ini menangani program-program strategis daerah seperti Rumah DP Rp0 dan Penataan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjutak menilai, dugaan korupsi PD Pembangunan Sarana Jaya terkait pembelian aset merupakan masalah yang sangat serius dan harus segera diurus melalui pertemuan langsung.

“Kita belum tahu jelas uraian masalahnya. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan siapa yang bermain karena ini kejadian baru. Tapi ini sangat serius,” kata Gilbert saat dihubungi, Selasa (10/3/2020).

Oleh karena itu, pemanggilan terhadap salah satu Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta di bidang properti itu harus segera dilakukan.

“Komisi B akan mengadakan rapat akan hal itu, memanggil direktur Sarana Jaya. Kita akan meminta klarifikasi. Kita gerah betul,” kata Gilbert.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pembelian tanah yang dilakukan PD Sarana Jaya. “Ya benar,” kata Brigjen Argo di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Namun demikian, pihaknya belum mau merinci kasus tersebut secara detil. “Penyidik belum kasih info lebih lanjut. Nanti ya,” ucap dia.

Argo pun membenarkan bahwa penyidik Bareskrim telah mengirimkan surat panggilan kepada pihak-pihak PD Sarana Jaya untuk dimintai keterangan terkait kasus ini.

Dalam surat itu, terdapat keterangan pemanggilan beberapa pihak PD Sarana Jaya dilakukan terkait pembelian aset termasuk tanah selama 2018-2020.

Perusahaan Daerah (PD) Sarana Jaya belum menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang diselidiki Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Di sisi lain, Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoori C Pinontoan mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan pemeriksaan tersebut apakah berkaitan dengan dugaan korupsi lahan rumah DP Rp0 atau yang lainnya.

“Saat ini kami belum bisa (memberi pernyataan), karena masih dalam permintaan keterangan. Terima kasih,” kata Yoori di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Yoori mengarahkan agar konfirmasi dan klarifikasi tersebut melalui staf Humas PD Sarana Jaya. Keren selaku staf Humas PD Sarana Jaya membenarkan soal pemeriksaan oleh Bareskrim Mabes Polri.

“Memang betul kita memang ada surat panggilan dari Bareskrim Polri, kami dimintai keterangan juga dan kami sangat kooperatif untuk hal itu,” kata Keren di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Keren yang mendapat disposisi dari Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoori C Pinontoan untuk memberi keterangan pada

media mengatakan, pihaknya hanya bisa memberi keterangan sebatas itu tanpa menerangkan kasus yang terjadi.

“Saat ini hanya itu yang bisa kami sampaikan, karena kan memang masih dalam proses dan kami serahkan semua pada pihak Kepolisian,” kata Keren.

Keren menyebutkan, pemeriksaan itu sudah berlangsung beberapa pekan. Beberapa pegawai di berbagai tingkat jabatan dalam perusahaan BUMD DKI Jakarta itu telah diperiksa.

Saat ditanyakan apakah kasus yang terjadi berkaitan dengan penugasan Pemprov DKI Jakarta untuk lahan DP Rp0 yang diduga dikorupsi, Keren tidak menjawabnya.

“Kalau untuk detilnya kami masih belum tahu karena kan itu memang ranahnya Kepolisian, saat ini kami hanya dimintai keterangan dan belum ada terduga atau apa,” tutur Keren.

Seperti diketahui, Program Rumah DP 0 Rupiah dinilai tidak sukses. Pasalnya, syarat yang diberlakukan tidak bisa terjangkau kalangan menengah ke bawah, khusus yang belum memiliki rumah.

“Harusnya terjangkau masyarakat bawah. Berpenghasilan Rp 7 juta itu bukan masyarakat kelas bawah. Program ini gagal,” ujar Pemerhati Sosial Syafti Hidayat kepada INDOPOS di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Pria yang akrab disapa Ukok itu menilai, kegagalan program itu dalam melayani masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari persyaratan yang berat. Termasuk kepemilikan rumah yang hanya bersifat sementara hingga 20-30 tahun habis masa pakai. “Artinya, masyarakat tidak memiliki rumah tersebut,” tandas dia.

Mundurnya kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, nilai Ukok, terindikasi dengan kegagalan program tersebut. Salah satu keagalannya yakni penyediaan

lahan atau rumah yang habis dalam puluhan tahun.

“Seharusnya, kalau di Jakarta beli lahan di luar agar rumah dan lahannya murni dimiliki masyarakat. Atau sekalian bikin yang sewa murah subsidi untuk masyarakat kelas bawah di lahan pemerintah yang tak terpakai,” tutur dia.

Menurut Ukok, program rumah oleh Pemprov DKI yang menjadi hak milik warga sangat sulit diwujudkan. “Program tersebut tidak rasional. Yang rasional itu rusun sewa. Tapi jangan sampai rusunnya dipakai oleh orang yang pakai mobil mewah, seperti di rusun kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat,” tegas eks Presidium Relawan Anies-Sandi di Pilgub 2017 itu.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Kelik Indrinyanto mengundurkan diri dari jabatannya usai mengajukannya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta.

Alasan mundur dari jabatan tersebut lantaran ingin menjadi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). “Iya. Ingin gabung ke TGUPP. Emang dia mau begitu,” kata Kepala BKD DKI Chaidir, Rabu (26/2/2020).

Chaidir menegaskan, tidak ada keterkaitan antara Program DP 0 rupiah milik Dinas Perumahan DKI dengan mundurnya Kelik sebagai pimpinan Dinas Perumahan DKI. “Tidak ada (keterkaitan dengan program DP 0 Rupiah), keinginan (Kelik),” kata Chaidir. (ib/ant)